

Perlu Rp8 Triliun Hadirkan Kereta Api, Dianggap Belum Layak Secara Finansial, Dishub Paparkan Hasil Studi Kelayakan



Sumber gambar :Kaltimpost.co.id Rabu, 11/12/2024

SAMARINDA - Mimpi Warga Samarinda untuk memiliki kereta api semakin jauh. Pasalnya hasil studi kelayakan (*feasibility study*/FS) menyebut Samarinda belum layak secara finansial menghadirkan moda transportasi tersebut. Namun demikian, adanya dokumen FS ini menjadi bukti Samarinda sudah siap jika sewaktu-waktu pemerintah pusat atau provinsi memberikan dukungan anggaran.

Wali Kota Samarinda Andi Harun mengakui bahwa pembangunan jalur kereta api ini membutuhkan investasi yang sangat besar, yakni sekitar Rp8 triliun. Angka ini dinilai cukup fantastis jika dibandingkan dengan jumlah penumpang yang diperkirakan akan menggunakan kereta api tersebut.

“Saat ini, jumlah penumpang yang diperkirakan menggunakan kereta api dari Samarinda ke APT Pranoto masih relatif sedikit. Namun, kami optimis bahwa ke depan jumlah penumpang akan meningkat seiring dengan pertumbuhan ekonomi dan aktivitas di sekitar bandara,” ujarnya.

Andi Harun berharap dokumen ini dapat menjadi dasar untuk menentukan apakah proyek kereta api ini layak untuk dilanjutkan atau tidak. “FS ini sangat penting karena akan menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah pusat dan provinsi dalam memberikan dukungan finansial,” jelasnya.

Andi Harun berharap pemerintah provinsi dan pemerintah pusat dapat mendukung penuh rencana pembangunan jalur kereta api. Menurutnya, proyek ini tidak hanya akan meningkatkan konektivitas di Samarinda, tetapi juga akan menjadi solusi untuk mengatasi masalah kemacetan dan polusi udara.

“Karena perlu bekerja sama dengan pemerintah provinsi dan pusat untuk mewujudkan proyek ini. Kami yakin, dengan dukungan semua pihak, maka dapat membangun transportasi massal yang modern dan efisien di Samarinda,” tegasnya.

Meskipun proyek kereta api ini masih menghadapi sejumlah tantangan, namun Andi Harun tetap optimis bahwa proyek ini akan terwujud di masa depan. Meskipun saat ini belum layak secara finansial, namun di masa depan, ketika aktivitas ekonomi di sekitar bandara meningkat, proyek ini akan menjadi menguntungkan. “Harus melihat proyek ini sebagai investasi jangka panjang,” pungkasnya. **(dra)**

Sumber berita:

1. KALTIM POST, Perlu Rp8 Triliun Hadirkan Kereta Api, Dianggap Belum Layak Secara Finansial, Dishub Paparkan Hasil Studi Kelayakan, 11/12/24

Catatan:

1. Berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian, perkeretaapian diselenggarakan dengan tujuan untuk memperlancar perpindahan orang dan/atau barang secara massal dengan selamat, aman, nyaman, cepat dan lancar, tepat, tertib dan teratur, efisien, serta menunjang pemerataan, pertumbuhan, stabilitas, pendorong, dan penggerak pembangunan nasional.
2. Diatur dalam Pasal 344 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian bahwa studi kelayakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 342 ayat (2) huruf b paling sedikit memuat analisis mengenai:
 - a. sosial ekonomi masyarakat;

- b. angkutan;
- c. perkiraan biaya pengadaan sarana perkeretaapian; dan
- d. kelayakan teknik, ekonomi, dan finansial.